



Laporan Triwulan I

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2022

PEMERINTAH KOTA BOGOR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Nomor 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Pasca dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor pada Tanggal 20 April 2019, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang telah diundangkan pada tanggal 10 September 2019. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Perda Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diatas, maka dalam penyusunan rencana tahunan, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bogor wajib melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2022.

RKPD Kota Bogor Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. RKPD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan akan tetap mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan lima tahunan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Daerah. Selain mempedomani dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2022 juga tidak bisa lepas dari dinamika yang muncul sebagai akibat dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dalam Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Pemerintah Kota Bogor masih dihadapkan pada tantangan penanganan COVID-19. Sebagaimana diketahui bersama bahwa penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia yang sampai saat ini masih masif penyebarannya, seperti yang terjadi di Kota Bogor. Dalam Laporan Harian Kumulatif Jumlah Kasus Covid-19 di Kota Bogor menunjukkan kecenderungan meningkat dengan parameter Orang tanpa gejala, Orang dalam pantauan, Pasien dalam pantauan dan kasus positif. Adapun beberapa tantangan selain kesehatan yang perlu diperhatikan akibat adanya pandemic Covid-19 diantaranya terkait masalah angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2022, upaya penanganan pandemi COVID-19 dilakukan secara preventif dalam merekonstruksi akibat dampak pandemi COVID-19. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh dalam menyesuaikan prioritas pembangunan daerah Kota Bogor di Tahun 2022 agar sinergis dan selaras dengan kebijakan-kebijakan Nasional maupun Provinsi Jawa Barat.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 147 menyebutkan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada :

1. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 pada periode berkenaan yaitu periode tahapan ke -4, yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.
2. Berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, serta Rancangan RKP Tahun 2022, dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
3. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2022, DPRD Kota Bogor memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi

4. masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah kota Bogor tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Proses Penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2022 dilaksanakan dengan pendekatan :

1. Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada Arah Kebijakan dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2022, serta Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
2. Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang teridentifikasi pada saat reses DPRD. Musrenbang Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada Bulan Desember Tahun 2020, dilanjutkan dengan musrenbang Kecamatan dan Forum perangkat Daerah yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2021 dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat Kota yang dilaksanakan pada akhir Maret 2021. Hasil usulan prioritas dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Kota Bogor;
3. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan sebagaimana disampaikan pada konsultasi publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari Tahun 2021;
4. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dan perencanaan pemenuhan janji-janji politis Kepala Daerah.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan berpedoman pada :
 - a. Penelaahan terhadap target-target yang dituangkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rancangan Awal RKP Tahun 2022, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, serta RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.
 - b. Penelaahan terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 melalui forum Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang kemudian disebut sebagai Forum Perangkat Daerah Musrenbang RKPD Tahun 2022.
 - c. Penelaahan terhadap saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan sebagaimana disampaikan pada konsultasi publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.
- 2) Penyusunan Rancangan RKPD merupakan hasil dari tahapan awal proses perencanaan yang bersifat partisipatif, yang dimulai dari tahapan sebagai berikut:
 - a. Musrenbang tingkat Kelurahan (dilaksanakan pada Bulan Desember 2020)
 - b. Musrenbang Tingkat kecamatan (dilaksanakan Pada Bulan Februari 2021).
 - c. Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan pada Bulan Maret 2020),
 - d. Pramusrenbang berupa sidang kelompok berdasarkan kelompok urusan Sosial Budaya, Pemerintahan, Fisik dan Infrastruktur, serta ekonomi (dilaksanakan pada Bulan Maret 2020). Dalam sidang kelompok sebagaimana dimaksud, Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang disampaikan oleh Perangkat Daerah melalui mekanisme teknokratis sudah dipadu serasikan dengan usulan kegiatan yang bersifat partisipatif yaitu usulan kegiatan masyarakat dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan, usulan kegiatan yang bersifat top down, dan usulan kegiatan yang bersifat politis baik itu aspirasi pokok pokok pikiran DPRD maupun janji-janji politis kepala daerah dengan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.

- e. Hasil sidang kelompok dalam pra musrenbang menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kota Bogor Tahun 2022 dan disampaikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam musrenbang tingkat Kota.
- 3) Rancangan Akhir RKPD Kota Bogor Tahun 2022 disempurnakan berdasarkan pada Rancangan RKPD Kota Bogor Tahun 2022 yang telah disampaikan pada saat musrenbang tingkat kota, hasil Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan prioritas.
- 4) Rancangan akhir RKPD Tahun 2022 selanjutnya difasilitasi oleh Gubernur melalui Bappeda Jabar sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Walikota Bogor tentang RKPD Kota Bogor Tahun 2022.
- 5) Untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal, dalam proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2022 didukung oleh sistem dan skema proses yang handal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel, diantaranya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Tahun 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;

5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan; Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. Evaluasi RKPD tercantum Pasal 306 ayat 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah* yang berbunyi Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota. Pada ayat 4 di pasal yang sama juga disebutkan bahwa Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota. Ditinjau dari segi metode, disebutkan dalam Pasal 305 Permendagri 86/2017 bahwa evaluasi RKPD dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota

- Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) supaya disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemic corona virus disease 2019 dan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
 17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta pemuatannya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 326);

28. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
31. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.189-Huam/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkamPanjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2022.

Adapun tujuan evaluasi ini adalah memberi gambaran sejauh mana program, kegiatan, dan subkegiatan tercapai atau tidak tercapai, beserta kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RKPD 2022 sampai dengan Triwulan IV, agar target rencana program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi maupun nasional. Dengan dilakukannya evaluasi maka dapat dilakukan antisipasi maupun perubahan yang diperlukan jika program/kegiatan/subkegiatan yang telah dilakukan terkendala atau tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Evaluasi pada laporan ini tergolong evaluasi formatif. Ketentuan evaluasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 merupakan tahapan untuk melakukan evaluasi formatif karena mengacu pada peraturan yang ada.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kota Bogor Triwulan I Tahun 2022 disajikan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyajian Laporan

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BOGOR

- 2.1 Visi dan Misi Kota Bogor
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Kota Bogor
- 2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
- 2.4 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2022

BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2022

- 3.1 Capaian Kinerja Sasaran
- 3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2022
- 3.3 Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Prioritas
Pembangunan Provinsi dan Nasional
- 3.4 Telaahan Kebijakan Nasional

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

- 4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- 4.2 Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BOGOR

2.1. Visi dan Misi Kota Bogor

2.1.1 Visi Kota Bogor

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut :

Kota Bogor : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.

2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Selain itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Konteks mewujudkan Kota yang Ramah keluarga, Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah bagaimana suatu kota memiliki daya dukung terhadap kehidupan keluarga yang dapat diukur salah satunya dengan melihat seberapa besar ketahanan keluarga yang tinggal dalam lingkungan kota tersebut. Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family*

resilience) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996).

Selanjutnya, dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya. Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial.

BPS mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global. Dinamika sosial skala lokal dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu dinamika sistem sosial skala lokal (*small scale system*) itu sendiri dan karakteristik sistem sosial skala lokal (*characteristics of the small scale system*) yang disebut sebagai Faktor

Komunal (*Communal Factors*). Faktor komunal yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) organisasi sosial reproduksi meliputi: formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi; (2) organisasi sosial produksi meliputi: stratifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia, dan kelas sosial; (3) organisasi sosial partisipasi politik meliputi: kepemimpinan lokal dan pola manajemen; dan (4) organisasi sosial keagamaan meliputi: hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku. Sementara itu, dinamika sosial skala global merujuk pada dinamika sosial pada sistem sosial skala global (*large scale system*) yang disebut sebagai Faktor Sosial (*Societal Factors*).

Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global (misalnya prevalensi upah/gaji buruh, moneterisasi, mekanisasi, penggunaan teknologi, penanaman modal asing, orientasi dan ketergantungan ekspor, dan ketergantungan impor); (2) derasnya arus pengetahuan dan informasi global; (3) derajat integrasi ke dalam tata kehidupan perkotaan; dan (4) penerapan kebijakan skala internasional, nasional, non-lokal berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan dan pendidikan). Akhirnya, ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global tersebut kemudian diidentifikasi oleh BPS sebagai: (1) tingkat perlindungan yang diberikan kepada penduduk lanjut usia, anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas; (2) tingkat dukungan yang diberikan kepada individu maupun keluarga/rumah tangga rentan seperti keluarga miskin, orang tua tunggal, anak-anak dan penduduk lanjut usia yang terlantar, orang dengan disabilitas yang terlantar; (3) tingkat partisipasi individu, kelompok dan keluarga dalam kehidupan sosial dan politik; (4) tingkat konservasi/keberlanjutan sumber daya lingkungan bagi penghidupan masyarakat lokal; dan (5) tingkat kontrol sosial terhadap kekerasan (rumah tangga, komunitas, dan lintas budaya).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber

daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

2.1.2. Misi Kota Bogor

Berikut ini adalah penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah kota Bogor Tahun 2021 untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEHAT.

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024 untuk mendukung pencapaian Misi ke -1 yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat.

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT adalah terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas, yang dapat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, Indeks kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 6 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor adalah Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir.
2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dan Indeks Pembangunan Olahraga.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan

sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman, persentase rumahtangga yang dilayani system air limbah yang layak, persentase luasan Kawasan kumuh, dan persentase reduksi sampah.

4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air
5. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara adalah Indeks Kualitas udara.
6. Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik

Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang CERDAS.

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024 untuk mendukung pencapaian Misi ke -2 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas.

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang CERDAS yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (*Smart People*), yang dapat diukur dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan *Smart City*.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas yaitu untuk Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (*Smart People*), maka ada 4 sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Rata-rata lama

sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Nilai rata-Rata USBN SD, dan Nilai Rata-rata UN SMP.

2. Meningkatnya kualitas generasi muda; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
3. Meningkatnya kreativitas dan Inovasi masyarakat; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Inovasi Daerah.
4. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*) maka ada 2 sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Level Kematangan *Smart City*.

Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA.

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk mendukung pencapaian Misi ke -3 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera.

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEJAHTERA yaitu :

1. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari Indeks Gini Rasio/Indeks ketimpangan.
2. Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah, yang dapat diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

B. Sasaran Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas yaitu untuk Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat ,maka ada 3 sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Menurunnya tingkat pengangguran; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
2. Menurunnya tingkat kemiskinan; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Angka kemiskinan.
3. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Ketahanan Keluarga (IKK).

Sementara itu, untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas yaitu untuk Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah maka ada 3 sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Per Kapita, dan Pengeluaran Per Kapita, dan Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit.
2. Terkendalinya tata ruang;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Persentase realisasi rencana struktur ruang pada periode rencana 2020-2024, dan persentase realisasi rencana pola ruang pada periode rencana 2020-2024.
3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah persentase jalan berkondisi mantap dan persentase cakupan pelayanan angkutan umum.

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2022

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Target Kinerja
1	Misi 1 :	Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat				
1.1	Tujuan 1 :	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	1	Indeks Kesehatan	Tahun	82,97
			2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	52,35
1.1.1	Sasaran 1 :	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73,93
1.1.2	Sasaran 2 :	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	% Rumah Tangga Ber-PHBS	%	70
			2	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	%	49
1.1.3	Sasaran 3 :	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	1	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang layak	%	80,62
			2	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman (perpipaan)	%	64,28
			3	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak	%	70,93
			4	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	7,20
			5	Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan Kota	%	2,12
			6	Persentase Reduksi Sampah	%	6,80
1.1.4	Sasaran 4 :	Terkendalnya sumber-sumber pencemar dan / atau kerusakan Lingkungan	1	Indeks Kualitas Air	Point	49,80
			2	Indeks Kualitas Udara	Point	86,10
1.1.5	Sasaran 5 :	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	1	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	4,21

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Target Kinerja
2	Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas					
2.1.	Tujuan 2.1 :	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)	1	Indeks Pendidikan	Point	73,26
			2	Indeks Pembangunan Pemuda	Point	62,09
			3	Indeks Inovasi Daerah	Point	621-630
				Kategori Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif
			4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	91,22
2.1.1	Sasaran 1 :	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal (<i>Smart People</i>);	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,62
			2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,63
2.1.2	Sasaran 2 :	Meningkatnya Kualitas generasi muda (<i>Smart People</i>)	1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	62,09
2.1.3	Sasaran 3	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1	Indeks Inovasi Daerah	Point	
			2	Kategori Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif
2.1.4	Sasaran 4 :	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan ketentraman ketertiban masyarakat	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	71,50
			2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	angka	71,50
2.2	Tujuan 2.2 :	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (<i>Smart government</i>),	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A
			2	Level Kematangan Smart City	Level	Integrative
2.2.1	Sasaran 1 :	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A
2.2.2	Sasaran 2 :	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	1	Level Kematangan Smart City	Level	Integrative

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Target Kinerja
3	Misi 3 :	Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera				
3.1	Tujuan 1 :	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Gini Rasio	Point	0,370
			2	Indeks Kebahagiaan	Point	72-73
3.1.1	Sasaran 1 :	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11,32
3.1.2	Sasaran 2 :	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	Angka Kemiskinan	%	6,90
3.1.3	Sasaran 3 :	Meningkatnya ketahanan keluarga	1	Indeks Ketahanan Keluarga	angka	75-77
3.2	Tujuan 2 :	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah	1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	5,37
			2	Indeks Daya Saing Daerah	Kategori	Tinggi
	Sasaran 1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	Trilyun Rp.	35,013
			2	PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	Trilyun Rp.	45,10
			3	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp.	11.534,00
			4	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	23,00
3.2.2	Sasaran 2 :	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Persentase realisasi rencana struktur ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	60,00
			2	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (periode rencana 2020-2024)	%	60,00
3.2.3	Sasaran 3 :	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1	Persentase Jalan yang Berkondisi mantap	%	86,00
			2	Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%	44,00

Sumber: Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor Tahun 2022

2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Proses perencanaan pembangunan Kota Bogor yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 sesuai dengan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2019, pada saat ini sedang dalam tahap penyusunan perubahan RPJMD tahun 2019-2024 yang disesuaikan berdasarkan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Namun proses pembangunan Kota Bogor tahun 2022 dalam prosesnya tetap memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta arah kebijakan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Dalam penyusunan prioritas pembangunan Kota Bogor tahun 2022 tidak lepas dari kondisi yang terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 akibat adanya pandemic Covid-19. Dalam menangani dampak akibat pandemic Covid-19 upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor Bersama unsur Muspida Kota Bogor telah dilakukan sosialisasi ataupun promosi termasuk penerapan protokol kesehatan secara ketat sekaligus peningkatan PHBS secara berjenjang di masyarakat, selain itu penyampaian informasi ini dilakukan pula disetiap kegiatan yang melibatkan kehadiran masyarakat, disekolah-sekolah, ruang publik bahkan kunjungan rumah ke rumah yang dilakukan oleh Satgas RW Siaga Covid-19. Selain melakukan promosi, Pemerintah Kota Bogor telah mengambil langkah kuratif melalui 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) secara intensif di setiap wilayah di Kota Bogor serta membangun Rumah Sakit Lapangan dan ruang isolasi mandiri sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang terpapar virus Covid-19 serta mengurangi penyebaran virus Covid-19. Dampak secara ekonomi dan social sebagai akibat pandemic Covid-19 Pemerintah Kota Bogor terus mengupayakan penguatan jaring pengaman social berupa bantuan social tunai, penguatan potensi pariwisata, penguatan UMKM, IKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif secara pengembangan urban farming. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor tersebut yang mendasari penyusunan prioritas pembangunan tahun 2022 yang fokus terhadap penanganan Kesehatan dan pemulihan ekonomi sesuai dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat sehingga akan terbentuk sinergitas dan keterpaduan antara kebijakan Pusat, Provinsi dan Daerah dalam penyusunan prioritas pembanhunan daerah. Prioritas pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap :

1. Permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan keselarasannya dengan Permasalahan dan Isu Strategis yang berkembang di tingkat Provinsi Jawa Barat dan di tingkat Nasional.
2. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2022.
3. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
4. Arah Kebijakan pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025, prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2019-2024.
5. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Bogor yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 sesuai target rencana tahun 2022.
6. Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2020.
7. Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kerangka Pendanaan Kota Bogor Tahun 2022.

Tema Pembangunan Daerah Kota Bogor pada Tahun 2022 sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah “**Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah**”. Tema tersebut dijabarkan kedalam 3 (Tiga) prioritas pembangunan Kota Bogor yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.
2. Pembangunan Infrastruktur untuk Penguatan Daya Saing Ekonomi berbasis potensi lokal.
3. Reformasi Birokrasi.

Dampak berkembangnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga sangat berpengaruh terhadap rencana pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2022. Oleh karenanya seiring dengan perubahan tema RKP dan RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2022, maka telah dirumuskan pula perubahan tema RKPD Kota Bogor Tahun 2022 dalam rangka lebih memfokuskan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor untuk pemulihan Sosial Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Kota Bogor. Adapun Perubahan rumusan Tema RKPD Kota Bogor Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tema Pembangunan Daerah Kota Bogor pada Tahun 2022
“Penguatan Daya Saing Daerah melalui Percepatan Pemulihan
Ekonomi Berbasis Potensi
Lokal”

Selanjutnya Tema Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2022 tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) prioritas pembangunan sebagaimana tertuang pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2022



Sumber: Hasil olahan Bappeda Kota Bogor, Tahun 2021

Untuk perwujudan sasaran pembangunan daerah Kota Bogor tahun 2022, telah ditetapkan arah Kebijakan pembangunan Kota Bogor yang difokuskan pada :

1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Penanganan Kesehatan.
2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pemulihan Ekonomi.
3. Peningkatan Kualitas pengajaran dan pembelajaran Pendidikan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
4. Pembangunan Infrastruktur yang mendukung pengembangan potensi ekonomi.
5. Penguatan 8 Area Perubahan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Gambar 2.2
Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan
Kota Bogor Tahun 2022



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Bogor, Tahun 2021

2.4 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2022

Tabel 2.2
Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2022 yang Disertai Pagu Indikatif

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022		
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
1	Misi 1 :	Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat										
1.1	Tujuan 1 :	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	1	Indeks Kesehatan	Tahun	81.86	82,17	82,48		82,97		
			2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	NA	NA	55,45		52,35		
1.1.1	Sasaran 1 :	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	81.86	73,41	73,61	73,82	73,93		
1	Program 1.1.1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	61,00	69,00	74,50	122,60	65,00	70.142,00	Dinkes
			2	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	2,99	2,67	3,15	3,27	3,00		
			3	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	3,35	2,50	3,36	0,06	3,20		
			4	Persentase Balita berstatus gizi normal	%	96,42	93,80	85,10		86,30		
			5	Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	%	81,22	83,00	90,00		90,00		
			6	Prevalensi Hipertensi	%	4,40	4,55	6,40	4,13	7,20		
			7	Case Fatality Rate Covid-19	%	N/A	N/A	2,40		1,20		

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022		
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
			8	Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	%	N/A	0,14	0,11	0,08	0,12		
			9	Akses sanitasi terhadap air bersih	%	N/A	N/A	99,00		99,40		
			10	Akses jamban sehat	%	72,70	74,21	79,00		82,00		
			11	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	%	95,85	94,02	91,1	90,31	93,00		
			12	Persentase pasien yang dilayani	%	100,00 (245.526 pasien)	100,00 (222.481 pasien)	100,00 (156.072 pasien)	100	100,00	200.259,00	RSUD
2	Program 1.1.1.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	%	N/A	80	87,00	81,00	90,00	6.797,00	Dinkes
			2	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	%	N/A	N/A	90,00	90,00	88,00		
			3	Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	81,00		
			4	Persentase Kepuasan Karyawan	%	72,50	68,25	78,15		≥ 80	6.000,00	RSUD
3	Program 1.1.1.3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	Persentase Produsen Perbekalan kesehatan Rumah tangga (PKRT) dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00	90,00	Dinkes

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022		
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
			2	Persentase Penggunaan Obat Rasional	%	N/A	72	80	80	79,00		
			3	Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	92,00		
4	Program 1.1.1.4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1	Persentase Peserta KB Metode Kontasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)	%	Peserta MKJP=34.725 PUS = 155.284 Persentase MKJP = 22,36	22,45	20,27	21,13	20,35	1.448,91	DPPKB
5	Program 1.1.1.5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	poin	84,90	83,70	75,84	70,56	71,3	135,00	DKPP
6	Program 1.1.1.6	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1	Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi	%	91,53	93,96	90,81	90,81	94,00	45,00	DKPP
7	Program 1.1.1.7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	-2,14	81,00	DKPP
			2	Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar	%	22,20	24,00	14,33	15,93	20,00	89,35	

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022		
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
1.1.2	Sasaran 2 :	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	% Rumah Tangga Ber-PHBS	%	66	65,8	66,30	69,27	70		
			2	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	%	45	45	39	34,10	49		
1	Program 1.1.2.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	4	4	4		8,00	15.051,00	Dinkes
			2	Predikat Kota Sehat	Predikat	Swastisaba Wiwerda	Swastisaba Wistara	Tahun 2020 tidak ada penilaian	Tahun 2021 Kota Bogor tidak mengikuti penilaian Kota Sehat	Swastisaba Wiwerda		
2	Program 1.1.2.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1	Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga (APMO)	%	45	45	39	34,10	49,00	80.301,00	Dispora
			2	Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan	Per jumlah Penduduk	33,34	33,34	33,34	0.001661 : 2.08	0,001734 : 2,08		
			3	Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)	%	16,66	16,66	16,66	16,6	49,98		
1.1.3	Sasaran 3 :	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	1	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang layak	%	NA	NA	NA	NA	80,62		
			2	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman (perpipaan)	%	91,44	92,58	81,46	68,49	64,28		

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022		
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
			3	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak	%	NA	NA	NA	NA	70,93		
			4	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	NA	NA	3,80	75,12	7,20		
			5	Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan Kota	%	2,62	0,00	2,3	2,11	2,12		
			6	Persentase Reduksi Sampah	%	6,26	6,89	7,61	7,85	6,80		
1	Program 1.1.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap ari minum melalui SPAM Jaringan perpipaan	%	91,44	92,58	70,90	68,49	64,28	3300,00	DPUPR
			2	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap ari minum melalui SPAM Bukan Jaringan perpipaan	%	0,54	0,25	0,71	15,34	59,30		
2	Program 1.1.3.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1	Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	%	NA	NA	NA	NA	0,01	200,00	DLH
			2	Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	%	NA	NA	NA	NA	0,02	250,00	
			3	Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	%	NA	NA	NA	NA	100,00	10.000,00	

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
			4	Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	%	NA	NA	NA	NA	100,00	3.150,00		
3	Program 1.1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak (%)	%	67,21	64,14	NA	NA	70,93	227.000,00	DPUPR	
			2	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman (%)	%	3,80	3,82	4,03	75,12	7,20			
4	Program 1.1.3.4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1	Persentase Panjang Jalan lingkungan permukiman terstruktur yang berkondisi baik	%	44,64	48,72	52,92	66,42			DPUPR	
			2	Persentase drainase lingkungan permukiman terstruktur berkondisi baik	%	20,31	21,21	23,53	38,15				
			3	Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan	titik	NA	NA	0,00	0,00				
			4	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	Lokasi	745,00	844,00	863,00	921,00				
5	Program 1.1.3.5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	Persentase penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota	%	70,00	-	75,00		85,00	3.258,20	Disperumki m	
			2	Persentase tingkat hunian rumah susun	%	76,61	76,61	77,75	84	90,00	9.577,01		
			3	Jumlah rekomendasi teknis pendukung kebijakan yang dikeluarkan	dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
6	Program 1.1.3.6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	Luas Kawasan Kumuh yang belum tertangani	Ha	401,35	310,93	272,00	250,12	313,68	9.358,60	Disperumki m	
7	Program 1.1.3.7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	Persentase Perumahan dan permukiman dengan PSU yang berkondisi baik	%	68,44	74,50	76,29		84,33	52.524,95	Disperumki m	
			2	Persentase Makam Umum per satuan Penduduk	%	11,71	12,25	12,00		11,40	7.149,00		
8	Program 1.1.3.8	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran	%	1,47	1,47	1,47	1,47	4,41	300,00	DPKP	
			2	Rata-Rata Respon time penanganan kebakaran	Menit	30 Menit	30 Menit	15,10	≥15	15,00	850,00		
9	Program 1.1.3.9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1	Persentase Reduksi Sampah (%)	%	6,30	6,89	7,61	7,85	6,80	1.375,00	DLH	
			2	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	%	76,00	77,04	77,20	81,00	77	16.700,00		
			3	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	%	195,900 m	48,80	48,80	48,80	48,80	5.150,00		
			4	Persentase peningkatan retribusi persampahan	%	9,50 Milyar	2,10	2,10	2,10	2,10	-		
1.1.4	Sasaran 4 :	Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan / atau kerusakan Lingkungan	1	Indeks Kualitas Air	Point	49,60	51,67	56,33	64,72	49,80			
			2	Indeks Kualitas Udara	Point	85,86	81,76	80,09	99,35	86,10			
1	Program 1.1.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN	1	Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	%	90,00	91,01	91.04	91,71	92,54	23.870,00	DPUPR	

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
		SUMBER DAYA AIR (SDA)	2	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	%	45,83	51,12	58,96	51,58	52,23	2.200,00		
			3	Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	Lokasi	6,00	6,00	6	1	1 LOKASI SITU ANGGALENA	3.000,00		
2	Program 1.1.4.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Indeks Kualitas Air	Point	49,60	51,67	56,33	64,75	36,17	1.180,00	DLH	
			2	Indeks Kualitas Udara	Point	85,86	81,76	80,09	99,35	79,63			
			3	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	NA	NA	3,92	5,87	7,11	250,00		
			4	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Ha	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	400,00		
3	Program 1.1.4.3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	%	30,00	30,00	30,00	45,00	50,00	400,00	DLH	
4	Program 1.1.4.4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	%	35,00	26,11	37,00		34,00	415,00	DLH	

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
5	Program 1.1.4.5	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan pelaku usaha	%	11,00	11,00	11,00	20,00	30,00	550,00	DLH	
6	Program 1.1.4.6	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan Hidup	%	3,00	3,97	5,29		7,94	700,00	DLH	
		2	Persentase sekolah adiwiyata (%)	%	30,00	30,00	30,00	33,00	35,00				
7	Program 1.1.4.7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	DLH	
1.1.5	Sasaran 5 :	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	1	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5,89	4,18	6,12	6,45	4,21			
1	Program	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)	Ha	437,21	465,87	0,054	2,30	1,00	12.670,87	Disperumki m	
			2	Luas RTH Publik yang terkelola dengan baik (Ha)	Ha	41,13	41,87	43,44	43,54	45,29	14.569,79		
			3	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Ha	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	400,00	DLH	

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
2	Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas												
2.1.	Tujuan 2.1 :	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People)	1	Indeks Pendidikan	Point	71,50	71,62	71,68		73,26			
			2	Indeks Pembangunan Pemuda	Point	NA	NA	-	NA	62,09			
			3	Indeks Inovasi Daerah	Point	600	30,640	5,162	57,80	621-630			
				Kategori Inovasi Daerah	Kategori					Inovatif			
2.1.1	Sasaran 1 :	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal (Smart People);	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,30	10,32	10,33	10,53	10,62			
			2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,38	13,40	13,41	13,42	13,63			
1	Program 2.1.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	APK PAUD/ RA	angka	49,04	58,98	44,8	50,20	51,00	1.823,00	Disdik	
			2	APK SD / MI/ Paket A	angka	112,40	108,63	107,27	105,98	113,08	48.000,00		
			3	APK SMP/ MTs/ Paket B	angka	104,10	105,80	107,80	106,40	105,00	20.876,00		
2	Program 2.1.1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1	Persentase Kesiapan penyelenggaraan kurikulum sesuai dengan kebijakan nasional dan muatan lokal daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	Disdik	
			2	Persentase Kesiapan penyelenggaraan kurikulum Pendidikan Dasar sesuai dengan kebijakan nasional dan muatan lokal daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
			3	Persentase Kesiapan penyelenggaraan kurikulum PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan kebijakan nasional dan muatan lokal daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
3	Program 2.1.1.3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi minimal S1 (%)	%	67,00	42,82	69,90	63,00	69,00	7.150,00	Disdik	
			2	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	%	19,00	27,00	30,00	24,00	23,00	545,00		
			3	Persentase Tenaga Pendidik SD yang memiliki kompetensi (%)	%	53,00	49,97	54,30	55,19	56,00	9.200,00		
			4	Persentase Tenaga Pendidik SMP yang memiliki kompetensi (%)	%	53,00	46,50	57,06	60,30	56,00	3.300,00		
			5	Jumlah PTK Berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	orang	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	445,00		
4	Program 2.1.1.4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh Masyarakat yang sesuai dengan Izin pendidikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	Disdik	
			2	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan Non Formal oleh Masyarakat yang sesuai dengan Izin pendidikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
5	Program 2.1.1.5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1	Persentase Sekolah yang mengembangkan muatan lokal bahasa sunda dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikulernya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	Disdik	
2.1.2	Sasaran 2 :	Meningkatnya Kualitas generasi muda (Smart People)	1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	NA	NA	NA	NA	62,09			
1	Program 2.1.2.1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Peringkat	Madya	Madya	Tidak ada Penilaian Kota Layak Anak	Madya	Nindya	563,00	DPPPA	
2	Program 2.1.2.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%)	%	75,00	76,00	60,00	78,00	79,00	482,00	DPPPA	
			2	Prevalensi kekerasan terhadap anak	angka	0,0240	0,0136	0,0082	0,0080	0,0122			
3	Program 2.1.2.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	%	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	4.834,00	Dispora	
			2	Predikat Kota layak pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017)	Predikat	30,00	30,00	30,00	40,00	50,00			
4	Program 2.1.2.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	950,00	Dispora	
5	Program 2.1.2.5	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota	%	61,98	100,00	40,00	80,00	100,00	200,00	Diarpus	

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022		
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
			2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/ perpustakaan keliling/ taman bacaan	%	102,10	31,98	4,00	4,50	40,00	75,00	
2.1.3	Sasaran 3	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1	Indeks Inovasi Daerah	Point	600	30,64	5,162	57,80			
			2	Kategori Inovasi Daerah	Kategori					Inovatif		
1	Program 2.1.3.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	%	NA	50	50	60	50,00	4.895,00	Bappeda
			2	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan	%	NA	NA	NA	NA	68,00		
			3	Prosentase inovasi masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor	%	NA	NA	NA	NA	36,00		
			4	Jumlah kampung tematik/ kampung wisata	Lokasi	NA	NA	2,00	2,00	2,00		
2.1.4	Sasaran 4 :	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan ketentraman ketertiban masyarakat	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	67,37	68,91	69,03	70,50	71,50		
			2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	angka	NA	NA	68,51	79,09	71,50		
1	Program 2.1.4.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Persentase Penegakan Perda	%					90,00	255,00	Satpol PP
			2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%					90,00	1.800,00	
2	Program 2.1.4.2	PROGRAM PENGARUS	1	Persentase perempuan berpolitik (%)	%	17	18,18	18,18	22,00	22,00	1.073,00	DPPPA

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
		UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%	70,00	75,00	100,00	100,00	82,00			
3	Program 2.1.4.3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak	%	70,00	75,00	78,00		82,00	153,00	DPPPA	
4	Program 2.1.4.4	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan (%)	%	75,00	76,00	52,45	78	79,00	189,00	DPPPA	
			2	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,024	0,014	0,011	0,008	0,011			
5	Program 2.1.4.5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	13,00	15,00	15,00	21	17,00	486,00	Disparbud	
6	Program 2.1.4.6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	%	10,00	10,00	10,00		7,00	781,00	Disparbud	
7	Program 2.1.4.7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1	Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	sarana	NA	NA	NA	NA	6,00	0,00	Disparbud	
			2	Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah	orang	NA	NA	NA	NA	195,00	0,00		
8	Program 2.1.4.8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1	Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan	unit	18,00	18,00	18,00		25,00	5.365,00	Disparbud	
9	Program 2.1.4.9	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	%	NA	NA	NA	NA	0,00	NA	Disparbud	

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
10	Program 1.06.10	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	815,76	Dinsos	
11	Program 2.1.4.11	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1	persentase lembaga kemasyarat yg aktif di kelurahan	persen	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	300,00	Bag. Kesra	
			2	persentase lembaga kemasyarat (LPM, RT, RW) Tingkat kecamatan yang aktif	%					65,00	36,00	Kecamatan	
12	Program 2.1.4.12	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan	%					86,00	658	Kecamatan	
13	Program 2.1.4.13	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk	rasio	3.950 orang	NA	0,06	0,15	13,00	299,00	Bakesbang pol	
14	Program 2.1.4.14	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1	Persentase Partisipasi Partai Politik dalam Pemilu	%	pilwalkot = 75,35 Pilgub = 75,37 Pilpres = 83,87	Pilpres dan pileg = 84,5	0,00	0,00	0,00	750,00	Bakesbang pol	
			2	Persentase Partisipasi Perempuan sebagai anggota legislatif	%	3.990,00	22,00	22,00	22,00	22,00			

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
15	Program 2.1.4.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif dan berdaya	%	20,00	20,00	44,00		30,00	2.500,00	Bakesbang pol	
16	Program 2.1.4.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1	Penurunan jumlah Pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika persatuan penduduk melalui upaya deteksi dini	Angka	0,00015	NA	0,00012	0,00010	0,00090	250,00	Bakesbang pol	
17	Program 2.1.4.17	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1	Persentase potensi Konflik Sara yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4.000,00	Bakesbang pol	
18	Program 2.1.4.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan	%					100,00	70.000,00	Kecamatan	
			2	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	%					100,00			
			3	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	%					100,00	3.382,00		
2.2	Tujuan 2.2 :	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government),	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	B	A			
			2	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Scattered	Integrati ve	Integrati ve	Integrati ve			

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
2.2.1	Sasaran 1 :	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	B	A			
1	Program 2.2.1.1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	Persentase kelurahan yang melaksanakan pemutakhiran profil kelurahan	%	87,00	90,00	90,00		100,00	181,00	Bag. Pem	
2	Program 2.2.1.2	PROGRAM PENATAAN DESA	1	Penyelenggaraan penataan desa	persen	NA	NA	NA	NA	85,00	99,00	Bag. Kesra	
3	Program 2.2.1.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	NA	NA	76	82	79,00	400,00	Diskominfo	
			2	Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	%	NA	NA	NA	NA	0,30	115,00		
4	Program 2.2.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	1.660,00	Diskominfo	
5	Program 2.2.1.5	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1	PersentasePD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku	%	17,00	70,00	2,25	26,67	58,00	255,00	Diarpus	
6	Program 2.2.1.6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1	Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan	%	100,00	27,00	100,00	71,37	100,00	125,00	Diarpus	
7	Program 2.2.1.7	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	1	Persentase Perizinan penggunaan arsip yang dilaksanakan sesuai SOP	%	64,00	NA	75,00		95,00	0,00	Diarpus	

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
8	Program 2.2.1.8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	Prosentase rekomendasi kebijakan bina metal yang ditindaklanjuti	%	80,00	83,40	78,00		85,00	8.677,00	Bag. Kesra	
			2	Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai dengan perjanjian kerjasama	%	70,00	70,00	70,00		80,00	1.075,00	Bag. Pem	
			3	Prosentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
			4	Presentasi indikator kinerja kunci yg mencapai target	Point	3,10	3,30	-		3,17	185,00		
			5	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	%	90	100,00	100,00	100,00	95,00	1.425,00	Bag. Huk. HAM	
			6	Prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00		
9	Program 2.2.1.9	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	Tingkat Pemanfaatan sistem informasi dalam pengadaan barang dan jasa	poin	NA	NA	0,00		24-26	1.004,66	Bag. PBJ	
			2	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	NA	NA	0,00		40,00			
			3	Tingkat Pemenuhan JF PPBJ di lingkungan UKPBJ	poin	NA	NA	0,00		5-6			
			4	Presentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	%	84,51	87,91	89,13		91	1.010	Bag. Adbang	
10	Program 2.2.1.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	9.146,88	Bag. Umum	
			2	Persentase Pelayanan keprotokolandan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.382,00	Bag. Prokompim	

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
			3	Nilai rata -rata indeks Kepuasan Masyarakat	Point	3,31	3,22	3,34		3,40	250,00	Bag. Org	
			4	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota	Point	B	BB	BB	B	A	224,00		
			5	Indeks kematangan organisasi	Point	3,84	44,9	45,41		45,69	250,00		
			6	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Point	3,31	3,22	3,34		3,40	12.971,10	Seluruh Perangkat Daerah	
			7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Point	B	BB	-		A		Seluruh Perangkat Daerah	
			8	Gap Analysis Kompetensi	%	NA	NA	NA	NA	30,00	1.253,00	I t d a	
11	Program 2.2.1.11	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu Sesuai Prolegda	%	80,00	50,00	40,00	80,00	85,00	64.844,00	Sekretariat DPRD	
			2	Persentase Perda yang Disosialisasikan	%	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00			
			3	Persentase Rapat dan Risalah Rapat yang Berkualitas	%	70,00	80,00	80,00	75,00	83,00			
12	Program 2.2.1.12	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1	Persentase ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	%	75,00	61,11	64,82	67,78*	69,00	1.835,00	Bappeda	
			2	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21,00	22,90	22,90	23,35*	24,00			

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
			3	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85,00	100,00	100,00		95,00			
			4	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	5,00	5,00	11,00	18,00	20,00			
			5	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	24,00	40,62	19,34	26,02	12,00			
13	Program 2.2.1.13	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah bidang Pembangunan Manusia dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	NA	NA	NA	NA	79,00	3.950,00	Bappeda	
			2	Persentase Keselarasan Rencana pembangunan Daerah bidang pemerintahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	NA	NA	NA	NA	79,00			
			3	Persentase keselarasan rencana pembangunan Daerah bidang perekonomian dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	NA	NA	NA	NA	79,00			
			4	Persentase Keselarasan Rencana pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Wilayah dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	NA	NA	NA	NA	79,00			
			5	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang pembangunan manusia	%	75,00	61,00	77,83		69,00			

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
			6	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang pemerintahan	%	NA	NA	NA	NA	69,00			
			7	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang perekonomian dan SDA	%	NA	NA	NA	NA	69,00			
			8	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	NA	NA	NA	NA	69,00			
14	Program 2.2.1.14	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.350,00	BKAD	
15	Program 2.2.1.15	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	Persentase administrasi pengeloaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	%	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00	5.200,00	BKAD	
16	Program 2.2.1.16	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	Point					105,00		BKPSDM	
			2	Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan	Point	75,00	98.34	98.67	98,85				
			3	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	Point					44,00			

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022		
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
			4	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu	Point	100,00	100,00	100,00	100,00			
			5	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	Point					125,50		
17	Program 2.2.1.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat	Point					25,50		BKPSDM
18	Program 2.2.1.18	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1	Prosentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	75,68 (CC)	97,03 (CC)	73,34		75,00	615,32	I t d a
			2	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
			3	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	%	83,77	76,25	69,33		90,00		
			4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	%	95,07	94,26	94,39		80,00		
			5	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	NA	75,68	75,68		85,00		
19	Program 2.2.1.19	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1	Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	%	43,24	NA	85		82,00	440,48	I t d a
			2	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Unit Kerja	0,00	0,00	0,00		6,00		

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
			3	Persentase Capaian MCP KPK	%	69,00	87,00	87,00		76,45			
20	Program 2.2.1.20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan	%					100,00	295,00	Kecamatan	
			2	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan	%					100,00	360,00		
	Sasaran 2 :	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	1	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Scattered	Integrati ve	Integrati ve	Integrati ve			
1	Program 2.2.2.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1	Pelayanan informasi Kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	%	100	100	100	100	100		BPBD	
2	Program 2.2.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan yang telah terintegrasi	%	63,00	64,00	69,00		81,00	2.030,00	Disdukcapil	
3	Program 2.2.2.3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1	Nilai Keterbukaan Informasi publik	level	NA	NA	Cukup Informatif		Cukup Informatif	8.724,00	Diskominfo	
4	Program 2.2.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN	1	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Index	NA	2,29	2,29	3,11	2,72	270,00	Diskominfo	

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022		
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
		APLIKASI INFORMATIKA	2	Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Index	NA	3,00	3,00		3,10	150,00	
			3	Nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi	index	NA	NA	NA		2,34	17.100,00	
			4	Nilai aspek penerapan manajemen SPBE	Index	NA	NA	NA		2,80	7.140,00	

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022		
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
3	Misi 3 :	Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera										
3.1	Tujuan 1 :	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Gini Rasio	Point	0.413	0,408	0,412	0,441	0,370		
			2	Indeks Kebahagiaan	Point	NA	NA	NA	NA	72-73		

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja 2022		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
3.1.1	Sasaran 1 :	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,65	9.10	12.68	11,79	11,32		
1	Program 3.1.1.1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1	Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat Kompetensi	%	NA	NA	NA	NA	90,00	983,00	Disnaker
			2	persentase perusahaan yang memiliki produktivitas tenaga kerja tinggi	%	NA	NA	NA	NA	6,00		
2	Program 3.1.1.2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	NA	NA	NA	NA	63.50	850,00	Disnaker
3	Program 3.1.1.3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1	Persentase rekomendasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit yg ditindaklanjuti	%	NA	NA	NA	NA	100,00	279,00	Disnaker
			2	Penetapan Besaran UMK	Rupiah	3842785	4.169.806	4.169.806	4.330.249	4.350.249		
4	Program 3.1.1.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1	persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	478,68	Disparbud
			2	jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	%	NA	245,00	15,00	30,00	30,00	466,08	
3.1.2	Sasaran 2 :	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	Angka Kemiskinan	%	5,93	5,77	6,68	7,24	6,90		
1	Program 3.1.2.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	%	23,47	27,85	100,00	100,00	100,00	748,20	Dinsos
			2	Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)	%	23,47	28,85	77,05	80,62	84,00		

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
2	Program 3.1.2.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1	Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi	%	18,80	63,79	100,00	100,00	100,00	229,29	Dinsos	
			2	Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	%	79,00	22,72	100,00	80,00	100,00	317,67		
			3	Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	85,62		
			4	Persentase Kasus Kekerasan dan <i>trafficking</i> (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	127,66		
			5	Jumlah lansia yang berdaya	Orang	150,00	100,00	46,00	100,00	100,00	150,00		
3	Program 3.1.2.3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	Persentase jumlah PMKS yang tertangani	%	91,45	75,32	66,30	95,00	87,00	198,39	Dinsos	
			2	Persentase KK miskin	%	1,45	75,32	66,30		19,57	450,33		
			3	Persentase penurunan anak terlantar	%	2,07	75,32	15,84	39,22	82,60	269,32		
4	Program 3.1.2.4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	Prosentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	462,90	Dinsos	

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja 2022		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
5	Program 3.1.2.5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	Prosentase rekomendasi kebijakan kesejahteraan yang ditindaklanjuti	%	73,00	74,00	75,00		85,00	33.595,00	Bag. Kesra
6	Program 3.1.2.6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	815,76	Dinsos
7	Program 3.1.2.7	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan								BPBD
3.1.3	Sasaran 3 :	Meningkatnya ketahanan keluarga	1	Indeks Ketahanan Keluarga	angka	NA	NA	85,20	85,20*	75-77		
1	Program 3.1.3.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	%	16,17	23,53	23,53	23,53	32,35	300,00	BPBD
			2	Persentase Sekolah aman bencana	%	2,15	3,05	3,41		4,12	200,00	BPBD
2	Program 3.1.3.2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1	Persentase Rumah Layak Huni	%	70,60	74,80	77,03	80,02	78,77	52.227,83	Disperumkim
3	Program 3.1.3.3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1	Indeks Ketahanan Keluarga	Point	NA	NA	85,20	85,20*	75-76	1.713,00	DPPPA
4	Program 3.1.3.4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Daerah	%	N/A	N/A	NA				DKPP

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja 2022		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
5	Program 3.1.3.5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1	Ketersediaan energi	Kkal /Kapita/ Hari	2.512,80	2.592,90	2.375,00	2.230,00	2.247,00	209,49	DKPP
			2	Ketersediaan Protein	Gr/ Kapita/ Hari	89,40	110,30	68,00	63,60	64,30		
6	Program 3.1.3.6	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1	Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan	%	18,30	12,39	25,96	16,41	16,21	90,00	DKPP
7	Program 3.1.3.7	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP	%	99,30	98,00	98,00	98,32	98,00	2.000,00	Disdukcapil
			2	Persentase Penduduk yang memiliki KK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	
			3	Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	%	15,00	20,00	23,00	35,83	50,00	3.860,00	
8	Program 3.1.3.8	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1	Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran	%	94,07	94,07	95,00	85,21	97,00	3.000,00	Disdukcapil
			2	Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	%	31,00	51,00	31,00	53,82	35,00	3.900,00	
9	Program 3.1.3.9	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1	Jumlah dokumen profil kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	Disdukcapil
10	Program 3.1.3.10	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1	Persentase Kebijakan dan Program kerja daerah untuk pengendalian jumlah penduduk yang terimplementasi sesuai dengan rencana	%	NA	NA	NA	NA	75,00	994,76	DPPKB
			2	Persentase PIK R Aktif	%	37,5	40,68	49,18	50	55,74		

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja 2022		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
11	Program 3.1.3.11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan) aktif	%	-	-	69,08		69,77	1.028,57	DPPKB
3.2	Tujuan 2 :	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah	1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6,14	6,04	-0,53	3,76	5,37		
			2	Indeks Daya Saing Daerah	Kategori	NA	Sedang	Tinggi		Tinggi		
	Sasaran 1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	Trilyun Rp.	30,414	32,254	32,084		35,013		
			2	PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	Trilyun Rp.	37,99	46,22	40,36	45,92*	45,10		
			3	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp.	10.940,00	11.825,00	11.564.00	11.716,00	11.534,00		
			4	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	19,68	19,22	19,11	20,49*	23,00		
1	Program 3.2.1.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	Jumlah kampung tematik/ kampung wisata	Lokasi	NA	NA	2,00	2,00	2,00		Bappeda
2	Program 3.2.1.2	PROGRAM PELAYANAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM	1	persentase peningkatan koperasi berijin	%	N/A	N/A	N/A	N/A			DKUKM
										40,00	776,25	DinKUKMDa gin
3	Program 3.2.1.3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1	persentase koperasi yg berkualitas	%	N/A	N/A	N/A	N/A			DKUKM
										8,00	700,00	DinKUKMDa gin
4	Program 3.2.1.4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1	Persentase Koperasi yang sehat	%	N/A	N/A	N/A	N/A			DKUKM
										5,00	1.000,00	DinKUKMDa gin

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja 2022		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
5	Program 3.2.1.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	%	N/A	N/A	N/A	N/A			DKUKM
										30,00	2.850,00	DinKUKMDa gin
6	Program 3.2.1.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1	Persentase Koperasi aktif	%	N/A	N/A	N/A	N/A			DKUKM
										10,33	2.790,00	DinKUKMDa gin
7	Program 3.2.1.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1	Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	%	N/A	N/A	N/A	N/A			DKUKM
										15,00	3.800,00	DinKUKMDa gin
8	Program 3.2.1.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1	persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	%	N/A	N/A	N/A	N/A			DKUMKM
										13,00	13.000,00	DinKUKMDa gin
9	Program 3.2.1.9	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	DPMPSTP
10	Program 3.2.1.10	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	Nilai Investasi	Trilyun Rp.	3,10	2,60	1,60	0,618	2,50	950,00	DPMPSTP
11	Program 3.2.1.11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1	Persentase Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	%	64,00	70,00	75,00	87,06	95,00	3.570,00	DPMPSTP
12	Program 3.2.1.12	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	1	Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	DPMPSTP

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja 2022		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
		PENANAMAN MODAL		waktu								
13	Program 3.2.1.13	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	750,00	DPMPSTP
14	Program 3.2.1.14	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	Ikan Konsumsi: 4.980 Ton Ikan Hias: 18.578.560 ekor	3,99	4,68	4,53	5,50	211,23	DKPP
15	Program 3.2.1.15	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	67,77	DKPP
16	Program 3.2.1.16	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1	Tingkat Hunian Akomodasi	%	NA	NA	NA	NA	55,00	478,47	Disparbud
			2	Persentase kunjungan wisatawan	%	NA	NA	NA	NA	10,00	478,50	
17	Program 3.2.1.17	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	7.965.987	9.160.885	3.457.722	3.734.340	4183843	459,00	Disparbud
18	Program 3.2.1.18	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Produk	70,00	70,00	40,00	30,00	40,00	153,17	Disparbud

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	2022			
										Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)		
19	Program 3.2.1.19	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	Persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura	%	N/A	N/A	N/A	N/A	10,35	414,64	DKPP	
			2	Persentase pemenuhan sarana peternakan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	17,13	189,00		
20	Program 3.2.1.20	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	Persentase pengelolaan kawasan LP2B	%	N/A	N/A	N/A	N/A	5,00	152,50	DKPP	
			2	Persentase pemeliharaan prasarana pertanian	%	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	574,99		
21	Program 3.2.1.21	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	Persentase luas lahan sawah yang dikendalikan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	39,25	5,78	DKPP	
22	Program 3.2.1.22	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1	Cakupan bina kelompok tani	%	68,96	69,35	75,08	76,37	75,87	149,31	DKPP	
23	Program 3.2.1.23	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	11,17	7,21	21,06				Disperdagin	
										22,00	151,00	DinKUKMDa gin	
24	Program 3.2.1.24	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1	Persentase Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	%	0,26	0,52	1,03				Disperdagin	
										1,60	406,00	DinKUKMDa gin	
25	Program 3.2.1.25	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1	Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau	%	3,69	N/A	4,00				Disperdagin	
										< 9,00	423,00	DinKUKMDa gin	
26	Program 3.2.1.26	PROGRAM PENGEMBANGAN	1	Nilai Realisasi Ekspor	USD	85.581.555	99.283.771,63	95.674.216,07	99.874.168,96			Disperdagin	

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja 2022		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
		EKSPOR								72.857.513,06	280,00	DinKUKMDa gin
27	Program 3.2.1.27	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1	Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran	%	2,59	6,81	10,82	95,01			Disperdagin
										11,92	400,00	DinKUKMDa gin
28	Program 3.2.1.28	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1	Persentase Produk Pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya	%	N/A	N/A	19,00				Disperdagin
										21,64	4.020,00	DinKUKMDa gin
29	Program 3.2.1.29	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1	Persentase peningkatan IKM yang produktif	%	8,11	30,30	-2,99	18,90			Disperdagin
										2,20	1.100,00	DinKUKMDa gin
30	Program 3.2.1.30	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	1	Persentase Jumlah perusahaan yang berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%					11,79	69,00	DinKUKMDa gin
31	Program 3.2.1.31	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	tingkat Inflasi Tahunan	%	3,69	3,02	2,18	2	2-4	350,00	Bag. Ekon
			3	Presentase BUMD yang Sehat	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00	
32	Program 3.2.1.32	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Nilai pajak daerah	dalam Juta Rp.	592.979	689.495	509.042	624.785	716.175	5,96	Bapenda
			2	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	6,75	16,28	-14,16	42,00	26,62		
			3	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dalam Juta Rp.	718.549	1.013.756	840.415	1.083.598	1.042.635		

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja 2022		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
			4	Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah	%	-20,32	41,08	-7,87	46,13	7.88		
3.2.2	Sasaran 2 :	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Persentase realisasi rencana struktur ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	0	20,00	20,00	40,00	60,00		
			2	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (periode rencana 2020-2024)	%	0	20,00	20,00	40,00	60,00		
1	Program 3.2.2.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1	Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan	%	80,00	93,70	88,17	88,46	86,00	250,00	DPUPR
			2	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%) terhadap IMB yang dikeluarkan	%	90,00	99,65	99,15	99,88	94,00	3.000,00	
			3	Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF	%					10,00	200,00	
2	Program 3.2.2.2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RDTRK	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPR
3	Program 3.2.2.3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	1	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	%	50,00	50,00	50,00	70,00	100,00	200,00	DPUPR

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja 2022		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
4	Program 3.2.2.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1	Persentase (%) Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	%	N/A	N/A	N/A	N/A	60,00	5.600,00	DPUPR
5	Program 3.2.2.5	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1	persentase Sengketa Tanah yang difasilitasi sesuai SOP	%	83,00	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bag. Pem
6	Program 3.2.2.6	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	550,00	DLH
3.2.3	Sasaran 3 :	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1	Persentase Jalan yang Berkondisi mantap	%	88,50	88,79	83,47	84,20	86,00		
			2	Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%	45,00	47,5	32,00	78,99	44,00		
1	Program 3.2.2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1	Persentasae jalan yang terbangun	%	N/A	N/A	N/A	N/A	86,00	45.000,00	DPUPR
			2	Persentasae jalan yang ditingkatkan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	86,00	17.500,00	
			3	Persentasae jalan yang dipelihara	%	N/A	N/A	N/A	N/A	72,00	23.500,00	
			4	Persentasae jembatan yang terbangun	%	N/A	N/A	N/A	N/A	60,00	2.800,00	
			5	Persentasae jembatan yang ditingkatkan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	56,97	4.600,00	
			6	Persentase pembangunan/ peningkatan jalur pedestrian	%	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	60.000,00	
2	Program 3.2.3.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS	1	Nilai V/C Ratio jalan kota	Rasio					0,61	1.667,53	Dishub
			2	Rasio Konektivitas angkutan jalan lingkup kota	Rasio					0,80	73.230,57	

No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja 2022		Perangkat Daerah
						2018	2019	2020	2021	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
		DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										
3	Program 3.2.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERATAAPIAN	1	Persentase penetapan kebijakan jaringan perkeretaapian kewenangan kota	%					7,69	248,42	Dishub
4	Program 1.1.3.4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1	Persentase Drainase Yang berkondisi baik	%	10,00	27,00	27,16	25,11	27,46	22.000,00	DPUPR
			2	Persentase dokumen Perencanaan Perencanaan SDA yang disusun	%	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	18.000,00	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2022

3.1. Capaian Kinerja Sasaran

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024, terdapat beberapa indikator sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Capaian Indikator Sasaran pembangunan tersebut sampai dengan triwulan I tahun 2022 merupakan pencapaian kinerja pada akhir tahun 2021, karena perhitungan indikator sasaran didapatkan selama satu tahun anggaran, oleh karena itu selama pelaporan triwulan I tahun anggaran 2022 capaian indikator sasaran tersebut belum tersedia.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Capaian
1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73,96	73,82
2	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rumah Tangga Ber-PHBS	%	69	69,27
		Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Poin	47	34,1
3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	94,86	68,49
		Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	70,42	75,12
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan Kota	%	2,27	2,11
		Persentase Reduksi Sampah	%	6,6	7,85
4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	Indeks Kualitas Air	Point	49,67	64,72
5	Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	Indeks Kualitas Udara	Point	86	99,35
6	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5,92	6,45
7	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,97	10,53
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,90	13,42

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Capaian
		Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	68,18	Tidak ada UN Tingkat SD Tahun 2021
		Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	58,32	Tidak ada UN Tingkat SMP Tahun 2021
8	Meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda	Point	59,13	NA
9	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	Indeks Inovasi Daerah	Point	611-620	57,8
10	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	70,50	70,50
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	71	79,09
11	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB	B
12	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	Level Kematangan Smart City	Level	Integrative	Integrative
13	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,22	11,79
14	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	5,78	7,24
15	Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga (cara perhitungan mengikuti buku panduan Kementerian PMPPA, 2016)	Point	74-75	85,2*
16	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6,75	3,76
		PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	Dalam Juta Rp.	42,73	45,92*
		Pengeluaran Per Kapita	Dalam Ribu Rp.	11.219	11.716
		Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	22	20,49*

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Capaian
17	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (periode rencana 2020-2024)	%	40	40
		Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (periode rencana 2020-2024)	%	40	40
18	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%	89,25	84,20
		Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%	60	78,99

3.2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2022

Ringkasan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan perangkat daerah berdasarkan urusan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2022 (%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
1	2	3		4				
A		Urusan Wajib Pelayanan Dasar		13,00		175.394.864.884		
1	1.01	Pendidikan	594.297.061.504	11,57	Sangat Rendah	49.947.611.121	8,40	Sangat Rendah
		Dinas Pendidikan		11,57		49.947.611.121		
2	1.02	Kesehatan	492.304.256.324	20,00	Sangat Rendah	96.136.364.519	19,53	Sangat Rendah
		Dinas Kesehatan		18,00		19.192.775.036		
		RSUD		22		76.943.589.483		
3	1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	359.747.619.859	3,01	Sangat Rendah	8.532.269.288	2,37	Sangat Rendah
		Dinas PUPR		3,01		8.532.269.288		
4	1.04	Perumahan dan Permukiman	236.465.135.971	6,81	Sangat Rendah	6.800.286.863	2,88	Sangat Rendah
		Dinas Perumkim		6,81		6.800.286.863		
5	1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	66.372.407.061	20,06	Sangat Rendah	11.892.460.490	17,92	Sangat Rendah
		Satpol PP		19,40		7.754.124.852		
		BPBD		21,67		1.567.997.280		
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		19,12		2.570.338.358		
6	1.06	Sosial	16.819.455.960	16,54	Sangat Rendah	2.085.872.603	12,40	Sangat Rendah
		Dinas Sosial		16,54		2.085.872.603		

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2022 (%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
B		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		13,78		76.527.026.190		
7	2.07	Tenaga Kerja	11.211.710.278	17,03	Sangat Rendah	1.540.132.584	13,74	Sangat Rendah
		Dinas Tenaga Kerja		17,03		1.540.132.584		
8	2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.913.308.076	11,60	Sangat Rendah	1.408.023.376	9,44	Sangat Rendah
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		11,60		1.408.023.376		
9	2.09	Pangan	20.542.986.093	8,07	Sangat Rendah	2.770.241.107	13,49	Sangat Rendah
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		8,07		2.770.241.107		
11	2.11	Lingkungan Hidup	141.992.665.375	17,70	Sangat Rendah	20.476.684.054	14,42	Sangat Rendah
		Dinas Lingkungan Hidup		17,70		20.476.684.054		
12	2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	20.255.404.706	27,80	Sangat Rendah	4.347.015.587	21,46	Sangat Rendah
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		27,80		4.347.015.587		
14	2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.738.940.495	7,35	Sangat Rendah	1.377.462.616	11,73	Sangat Rendah
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		7,35		1.377.462.616		
15	2.15	Perhubungan	157.095.667.313	10,74	Sangat Rendah	16.879.097.260	10,74	Sangat Rendah
		Dinas Perhubungan		10,74		16.879.097.260		
16	2.16	Komunikasi dan Informatika	24.425.165.244	22,33	Sangat Rendah	1.575.397.100	6,45	Sangat Rendah

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2022 (%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
		Dinas Komunikasi dan Informatika		22,33		1.575.397.100		
17		Statistik	208.191.400	22,09	Sangat Rendah	17.064.500	8,20	Sangat Rendah
		Dinas Komunikasi dan Informatika		22,09		17.064.500		
18		Persandian	196.948.880	2,09	Sangat Rendah	2.520.000	1,28	Sangat Rendah
		Dinas Komunikasi dan Informatika		2,09		2.520.000		
19	2.17	Koperasi dan UKM	43.989.413.559	3,62	Sangat Rendah	443.046.000	1,01	Sangat Rendah
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		3,62		443.046.000		
20	2.18	Penanaman Modal	17.828.864.510	0,00	Sangat Rendah	326.054.135	1,83	Sangat Rendah
		DPMPTSP		0,00		326.054.135		
21	2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	152.816.816.620	27,42	Sangat Rendah	17.885.312.639	11,70	Sangat Rendah
		Dinas Pemuda dan Olahraga		27,42		17.885.312.639		
22	2.22	Kebudayaan	19.067.728.697	16,88	Sangat Rendah	2.136.124.515	11,20	Sangat Rendah
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		16,88		2.136.124.515		
23	2.23	Perpustakaan	12.756.268.000	17,27	Sangat Rendah	2.001.421.394	15,69	Sangat Rendah
		Dinas Arsip dan Perpustakaan		17,27		2.001.421.394		
24	2.24	Kearsipan	11.915.146.503	8,44	Sangat Rendah	3.341.429.323	28,04	Sangat Rendah
		Dinas Arsip dan Perpustakaan		8,44		3.341.429.323		
C		Urusan Pilihan		4,81		2.946.467.772		
25	3.25	Kelautan dan Perikanan	495.130.000	0	Sangat Rendah	19.261.000	3,89	Sangat Rendah

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2022 (%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		0		19.261.000		
26	3.26	Pariwisata	3.025.094.500	5,00	Sangat Rendah	59.240.000	1,96	Sangat Rendah
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		5,00		59.240.000		
27	3.27	Pertanian	2.959.830.400	0	Sangat Rendah	110.031.000	3,72	Sangat Rendah
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		0		110.031.000		
28	3.30	Perdagangan	2.496.765.650	7,03	Sangat Rendah	175.610.000	7,03	Sangat Rendah
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		7,03		175.610.000		
29	3.31	Perindustrian	29.245.015.080	12,04	Sangat Rendah	2.582.325.772	8,83	Sangat Rendah
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		12,04		2.582.325.772		
D		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		18,17		25.112.105.900		
30	4.01	Sekretariat Daerah	245.088.578.641		Sangat Rendah		-	
31	4.02	Sekretariat DPRD	134.216.429.354	18,17	Sangat Rendah	25.112.105.900	18,71	Sangat Rendah
		Sekretariat DPRD		18,17		25.112.105.900		
E		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		4,77		10.375.021.905		
32	5.01	Perencanaan	24.066.334.990	0	Sangat Rendah	2.322.845.564	9,65	Sangat Rendah
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0		2.322.845.564		
33	5.02	Keuangan	199.863.642.192	3,13	Sangat Rendah	4.916.772.721	2,46	Sangat Rendah
		Badan Pendapatan Daerah		6,25		2.661.567.445		

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2022 (%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
		Badan Keuangan dan Aset Daerah		0		2.255.205.276		
34	5.03	Kepegawaian	68.746.319.227	15,96	Sangat Rendah	3.001.225.620	4,37	Sangat Rendah
		BKPSDM		15,96		3.001.225.620		
35	5.05	Penelitian dan Pengembangan	4.191.999.000	0	Sangat Rendah	134.178.000	3,20	Sangat Rendah
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0		134.178.000		
F		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		14,27		2.524.350.065		
36	6.01	Pengawasan	22.777.695.922	14,27	Sangat Rendah	2.524.350.065	11,08	Sangat Rendah
		Inspektorat		14,27		2.524.350.065		
G		Unsur Kewilayahan		16,60		32.489.832.670		
37	7.01	Kecamatan	216.252.308.434	16,60	Sangat Rendah	32.489.832.670	15,02	Sangat Rendah
		Kecamatan Bogor Utara		9,41		4.569.666.797		
		Kecamatan Bogor Selatan		17,94		6.596.090.131		
		Kecamatan Bogor Timur		18,46		3.479.341.235		
		Kecamatan Bogor Barat		18,35		7.328.773.569		
		Kecamatan Bogor Tengah		19,42		5.324.093.760		
		Kecamatan Tanah Sareal		16,00		5.191.867.178		
H		Unsur Pemerintahan Umum		0		4.918.139.367		
38		Kesatuan Bangsa dan Politik	14.138.228.942	0	Sangat Rendah	4.918.139.367	34,79	Sangat Rendah

Pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2022, untuk keseluruhan program dan kegiatan di Kota Bogor, capaian kinerja sebesar 10,33% dengan total realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 330.709.473.896. Capaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 13,00% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 175.394.864.884, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar 13,78% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 76.527.026.190, Urusan Pilihan sebesar 4,81% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.946.467.772, Unsur Pendukung Urusan Pemerintah sebesar 15,43% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 25.533.771.043, Unsur Penunjang Urusan Pemerintah sebesar 4,77% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 10.375.021.905, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah sebesar 14,27% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.524.350.065, Unsur Kewilayahan sebesar 16,60 % dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 32.489.832.670, dan Unsur Pemerintahan Umum sebesar 0% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4.918.139.367.

3.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Prioritas

Pembangunan Provinsi dan Nasional

Dukungan Pemerintah Kota Bogor dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional dituangkan dalam bentuk penyelarasan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi terhadap prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Kota Bogor menetapkan Program Pembangunan Daerah yang merupakan gambaran program-program prioritas di Kota Bogor. Program pembangunan daerah Kota Bogor ditetapkan melalui pendekatan *top-down*, *bottom-up*, politis, dan partisipatif. Dalam implementasinya, prioritas pembangunan Kota Bogor tahun 2021 perlu dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan baik pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun pada tingkat Nasional sehingga tercipta pembangunan yang selaras dan bersinergi. Keterkaitan antar prioritas dapat dilihat dari kesinambungan poin-poin yang diprioritaskan pada seluruh level pemerintahan. Adapun keterkaitan antara prioritas Kota Bogor dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Sinergitas Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Barat,
dengan Prioritas Kota Bogor Tahun 2019-2024

Prioritas Nasional Tahun 2020-2024		Prioritas Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Prioritas Kota Bogor Tahun 2019-2024	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP2'	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP11'	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	PK2	Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP8'	Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa)	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP2'	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;	PK2	Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
		PP4'	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial		
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP5'	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP1'	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah		
		PP4'	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP2'	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;		
		PP3'	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;		

Prioritas Nasional Tahun 2020-2024		Prioritas Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Prioritas Kota Bogor Tahun 2019-2024	
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP9'	Pendidikan Agama dan Tempat ibadah Juara	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP5'	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;		
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP10'	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
				PK2	Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP10'	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;	PK2	Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7'	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	PK3	Reformasi Birokrasi

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Dalam RPJMN 2015-2018 disebutkan beberapa program yang berhubungan dengan Kota Bogor. Peninjauan ini dibutuhkan untuk melihat sinkronisasi program nasional dengan program pembangunan Kota Bogor dalam merespon deregulasi di level nasional. Beberapa program yang disebutkan dalam RPJMN 2015-2018 adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional yaitu pengembangan Kawasan strategis Nasional, salah satunya adalah Kawasan Bodebekpunjur (Kota

Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, dan Kawasan Puncak di Kabupaten Cianjur).

2. Kota Bogor, Depok, dan Bekasi: Kota satelit utk mendorong pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Jakarta; Simpul pelayanan dan jasa perkotaan; perdagangan dan jasa serta industri padat tenaga kerja.
3. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Kepentingan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, yaitu memiliki fungsi peningkatan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023, visi Pembangunan Jawa Barat pada periode waktu yang sama adalah :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Visi ini memiliki makna yaitu :

1. Jabar Juara Lahir Batin Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri
2. Inovasi Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan
3. Kolaborasi Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Mengacu pada Formulir E.60 (Evaluasi terhadap RKPD) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam pengisiannya, Perangkat Daerah seharusnya menyebutkan faktor pendorong keberhasilan pencapaian yang merupakan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target, serta mengisi faktor penghambat pencapaian kinerja yang merupakan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas. Sangat disayangkan, hanya sedikit Perangkat Daerah yang melengkapi pengisian faktor pendorong dan penghambat, padahal substansi ini sangat penting untuk membantu dalam perumusan solusi sehingga masalah yang terjadi dapat tertangani secara tepat.

Dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan triwulan I tahun 2022, secara umum beberapa faktor pendorong dan penghambat yang sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur untuk pelaksanaan program dan kegiatan /sub kegiatan untuk selalu normatif sesuai peraturan perundang-undangan
2. Anggaran dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat, dimana Ketika anggaran yang diberikan mencukupi maka dapat mendorong ketercapaian kinerja program dan kegiatan sedangkan ketika anggaran yang diberikan kurang dari cukup, maka dapat menjadi penghambat keberlangsungan program, kegiatan, dan sub-kegiatan
3. Manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
4. LAKIP instansi pada tiap satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bogor telah dibuat secara periodik sebagai bentuk transparansi dan pengukuran kinerja instansi, dengan didukung oleh keselarasan dan kesesuaian indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran pada masing-masing satuan unit kerja sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi.

5. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai arahan dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, dukungan dari staf dan bawahan, perencanaan, dukungan anggaran yang tersedia, dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik
6. Sinergitas yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan
7. Dukungan Stakeholder yaitu pihak yang juga memiliki kepentingan dalam keberlangsungan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, misalnya sesama Perangkat Daerah atau juga instansi-instansi lainnya. Ketika stakeholder dapat bekerjasama dengan baik, maka dapat membantu dalam ketercapaian kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan
8. Paradigma pemerintah daerah dalam proses pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai salah satu subyek pembangunan
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan
2. Waktu pelaksanaan berkaitan erat dengan perencanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, ketika waktu pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan maka dapat menjadi faktor penghambat keberjalanan program, kegiatan, dan sub-kegiatan
3. Kejadian tidak terduga merupakan kejadian yang tidak diduga akan terjadi pada tahun perencanaan, misalnya bencana alam, wabah, dan lain sebagainya yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan
4. Ketersediaan data, ketersediaan data sektoral yang belum lengkap dan terpadu
5. Lemahnya/kurangnya pemahaman para stakeholder terhadap sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
6. Kurangnya sarana dan prasana dalam mendukung kinerja pegawai
7. Lemahnya tingkat koordinasi antar instansi terkait
8. Keterbatasan SDM personal

9. Rendahnya/terbatasnya kapasitas fiskal APBD
10. Transisi dari sistem lama ke sistem baru yang masih perlu disosialisasikan.

4.2. Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya

Berdasarkan dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah triwulan I tahun 2022, beberapa tindak lanjut yang disarankan untuk dilaksanakan pada triwulan atau RKPD berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan.
2. FGD di Bidang-Bidang Perencanaan Pembangunan
3. Meningkatkan koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan yang lebih matang.
4. Diklat teknis terkait pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2022 Triwulan I dilakukan untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan publik yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai capaian kinerja atas pelaksanaan rencana, identifikasi permasalahan dan penyebab permasalahan, faktor-faktor penentu keberhasilan, faktor penghambat keberhasilan, serta rekomendasi dan tindak lanjut atas temuan dari hasil evaluasi hingga Triwulan I.

Evaluasi Triwulan I terhadap RKPD 2022 dibutuhkan untuk memperbaiki dan memberikan masukan serta intervensi pada pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor di triwulan berikutnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran selama triwulan I tahun anggaran 2022 lebih banyak kepada ketersediaan pendukung kegiatan antara lain: kondisi pandemi yang menyebabkan pembatasan pelaksanaan kegiatan, sumber daya manusia yang kompeten, data/informasi yang tersedia, sarana dan prasarana penunjang pekerjaan, serta kurangnya pembinaan kepada pelaksana kegiatan, khususnya dari atasan kepada bawahan.

5.2 REKOMENDASI

Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022 untuk triwulan atau RKPD berikutnya adalah:

1. Pembuatan sistem/aplikasi pengendalian, monitoring dan evaluasi agar memudahkan evaluasi yang dilakukan
2. Meningkatkan konsistensi dalam penyusunan rencana maupun indikator pengukuran kinerja dalam setiap dokumen perencanaan. Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan keuangan agar konsisten antara RPJMD, Renstra, Renja PD, dan RKPD sesuai cascading penyetaraan nomenklatur lama dan baru
3. Menambah atau meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksana kegiatan, perencanaan program dan kegiatan agar lebih akurat dan pendanaan yang tepat
4. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan oleh perangkat daerah

secara berkesinambungan

5. Perlu adanya kerjasama Perangkat Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan ketelitian dalam pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara cermat dan tepat waktu
6. Pembinaan kepada pegawai
7. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengejar keterlambatan pencapaian target pada triwulan selanjutnya

